

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ilmu Ekonomi Regional

Ilmu ekonomi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan segala keterbatasan akan ketersediaan dan kemampuan masing-masing orang. Ilmu ekonomi regional merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang memasukkan perbedaan potensi antarwilayah. Ilmu ekonomi regional memiliki fokus pada analisis suatu wilayah secara keseluruhan maupun hanya sebagian wilayah dengan berbagai perbedaan potensi dan pengaturan kebijakan yang membantu kenaikan pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah (Prisyarsono dan Sahara, 2007).

Tujuan dari Ilmu Ekonomi Regional sendiri tidak terlampau berbeda dengan Ilmu Ekonomi secara umum. Menurut Ferguson (1965, dikutip dalam Prisyarsono dan Sahara, 2007) terdapat tiga tujuan utama dalam kebijakan ekonomi secara umum, di antaranya sebagai berikut.

- 1) *Full employment*, yaitu tingkat pengangguran rendah yang sekurang-kurangnya menjadi fokus perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah.

- 2) *Economic growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan menaikkan tingkat pendapatan masyarakat.
- 3) *Price stability*, yaitu kestabilan harga yang membuat masyarakat merasa tenang. Volatilitas terhadap harga akan membuat masyarakat merasa was-was akan simpanan yang merupakan hasil kerja-kerasnya.

Terdapat tujuan Ilmu Ekonomi secara umum yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, yaitu *Price Stability*. Meskipun begitu, pemerintah daerah bisa membantu pemerintah pusat memenuhi tujuan ketiga dengan mencapai tujuan pertama dan kedua. Selain itu, ruang lingkup Ilmu Ekonomi Regional yang lebih kecil membuat beberapa hal yang bisa dicapai pemerintah daerah menjadi lebih baik dibanding yang dilakukan pemerintah pusat. Hal tersebut merupakan tujuan lain dari Ilmu Ekonomi Regional selain yang memiliki kesamaan dengan Ilmu Ekonomi secara umum, di antaranya sebagai berikut.

1. Lingkungan hidup yang lebih terjaga.
2. Pembangunan yang lebih merata.
3. Penetapan sektor basis atau sektor unggulan.
4. Sinergi dan kesinambungan antarsektor dalam wilayah.
5. Pemenuhan kebutuhan pangan wilayah.

Secara garis besar terdapat dua jenis manfaat dalam Ilmu Ekonomi Regional, yaitu manfaat mikro dan manfaat makro. Manfaat mikro lebih berfokus pada peran Ilmu Ekonomi Regional dalam membantu seorang perencana wilayah dalam menentukan proyek yang lebih strategis untuk dikerjakan, namun hanya secara gambaran dan tidak menunjuk secara eksplisit. Seorang perencana wilayah

memiliki wilayah kerja yang amat luas, sehingga memerlukan banyak waktu dan biaya untuk melakukan survei. Dengan adanya Ilmu Ekonomi Regional, waktu dan biaya yang amat besar tersebut bisa dipangkas menggunakan alat analisis yang bisa menunjukkan keunggulan komparatif suatu wilayah. Selain itu, penerapan Ilmu Ekonomi Regional dalam hal tersebut juga relatif murah karena hanya memerlukan data sekunder. Selanjutnya, manfaat Ilmu Ekonomi Regional secara makro bisa dilihat dari penerapan Ilmu Ekonomi Regional oleh pemerintah pusat dalam mengoptimalkan laju pertumbuhan ekonomi wilayahnya secara keseluruhan. Pemerintah dapat menggunakan alat analisis dalam Ilmu Ekonomi Regional untuk melihat keunggulan komparatif dari wilayah yang berbeda-beda. Keunggulan komparatif tersebut bisa digunakan untuk menentukan skala prioritas pada masing-masing wilayah. Maksimalisasi skala prioritas tersebut dapat menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*) dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2.2 Konsep PDRB

Pembahasan tentang Ilmu Ekonomi Regional tentunya tidak akan lepas dari konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami terkait PDRB, antara lain sebagai berikut.

- 1) Wilayah Domestik dan Regional. Istilah domestik dan regional di sini merujuk pada provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan ekonomi yang dihitung adalah seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu tanpa

memandang apakah kegiatan ekonomi tersebut dilakukan oleh masyarakat lokal (Residen) atau masyarakat dari daerah lain (Non-Residen).

- 2) Produk Domestik. Seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah domestik merupakan produk domestik wilayah tersebut. Selanjutnya, yang disebut dengan pendapatan domestik adalah pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah domestik. Diketahui bahwa dalam suatu wilayah domestik faktor produksi yang digunakan dalam suatu wilayah domestik bukan hanya berasal dari wilayah tersebut, sebagian di antaranya berasal dari wilayah lain. Hal ini juga berlaku sebaliknya, sebagian faktor produksi penduduk dari wilayah tersebut juga digunakan untuk kegiatan produksi di wilayah lain. Oleh karena itu, nilai dari produk domestik tidak sama dengan penghasilan yang diterima oleh penduduk di wilayah tersebut.
- 3) Produk Regional. Secara sederhana produk regional merupakan produk yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dihasilkan oleh penduduk lokal suatu wilayah. Berbeda dengan produk domestik, produk regional menghitung seluruh pendapatan yang berasal dari faktor penduduk lokal dan menghilangkan pendapatan yang dihasilkan oleh faktor produksi dari wilayah lain.
- 4) Residen dan Non-Residen. Seseorang atau badan bisa diklasifikasikan sebagai residen jika melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan penduduk suatu wilayah merupakan individu yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.
- 5) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Merupakan seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di

suatu wilayah domestik yang dihitung menggunakan tahun tertentu sebagai dasar perhitungan (tahun dasar).

2.3 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Regional

Menurut Ridwan (2016), landasan teori menjadi penting dan diperlukan dalam implementasi pembangunan untuk menjelaskan hubungan antara fakta yang diobservasi karena bisa menjadi suatu kerangka dalam analisis dan prediksi terhadap indikasi baru yang diperkirakan terjadi di masa depan. Seiring dengan perkembangan zaman, teori terkait pembangunan wilayah juga makin berkembang dan bisa menjadi landasan dalam implementasi pembangunan wilayah. Beberapa teori tersebut di antaranya sebagai berikut.

1) Aliran Klasik

Merupakan aliran yang pertama kali dipelopori oleh Adam Smith pada akhir abad ke-18. Dalam aliran klasik, prinsip persaingan bebas sangat dijunjung tinggi. Itu artinya pemerintah dianggap tidak terlibat dalam aktivitas perekonomian. Terdapat beberapa tokoh yang menganut aliran Klasik, di antaranya sebagai berikut.

a) Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu perkembangan teknologi dan pertumbuhan jumlah penduduk. Jika dirinci secara detail, perkembangan teknologi dipengaruhi oleh akumulasi modal. Modal yang terakumulasi tersebut memungkinkan terlaksananya spesialisasi yang akan meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas tersebut diharapkan menambah nilai investasi dan mendorong perkembangan teknologi dan kenaikan pendapatan. Pendapatan yang naik akan meningkatkan kesejahteraan dan

mendorong pertumbuhan jumlah penduduk. Selain dianggap sebagai pasar akibat naiknya pendapatan, penduduk juga dianggap sebagai tabungan yang merupakan akumulasi modal. Hal tersebut akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara terus menerus atau bersifat kumulatif.

- b) Menurut David Ricardo, jumlah penduduk dan modal yang terus bertumbuh akan memicu kelangkaan pada ketersediaan lahan subur. Kelangkaan tersebut akan mengakibatkan sewa lahan subur menjadi semakin mahal dibanding lahan yang kurang subur. Pengolahan lahan yang subur akan menghasilkan pendapatan yang tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan untuk membayar sewa lahan subur yang tinggi.
- c) Robert Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terjadi akan menyebabkan pertumbuhan kebutuhan pangan. Pertumbuhan pangan tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk, oleh karena itu terjadi ketimpangan antara jumlah penduduk dan jumlah bahan pangan yang tersedia. Hal tersebut nantinya akan menurunkan tingkat kesejahteraan penduduk.
- d) J.B. Say berpendapat bahwa setiap barang yang dihasilkan oleh produsen akan senantiasa memiliki pembelinya sendiri, sehingga kelebihan produksi dan pengangguran merupakan hal yang mustahil. Pendapat yang dikemukakan oleh J.B. Say biasa dikenal sebagai Hukum Pasar. Hukum tersebut hanya berlaku ketika pertumbuhan pendapatan digunakan seluruhnya untuk membeli barang dan jasa sehingga tambahan pendapatan sama dengan tambahan konsumsi untuk barang dan jasa. Pemikiran yang dikemukakan oleh J.B. Say tersebut merupakan

pemikiran yang optimistik, berbeda dengan pemikiran Robert Malthus bersifat pesimistik.

2) Aliran Neoklasik

Merupakan aliran yang menggantikan aliran klasik. Berikut merupakan beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang disumbangkan oleh ahli yang menganut aliran Neoklasik.

- a) Sama seperti aliran klasik menurut Adam Smith, aliran neoklasik juga berpendapat bahwa akumulasi modal merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi.
- b) Pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang berangsur-angsur, harmonis, dan kumulatif.
- c) Aliran neoklasik optimis terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terdapat beberapa asumsi dalam aliran neoklasik yang kurang tepat diterapkan dalam analisis ilmu ekonomi regional, di antaranya sebagai berikut.

- a) *Full employment* yang terus menerus tidak dapat diterapkan sebagai asumsi dalam sistem multiregional di mana terjadi permasalahan regional yang muncul sebagai akibat dari perbedaan geografis dalam hal sumber daya.
- b) Persaingan sempurna tidak benar-benar bisa diterapkan dalam ekonomi regional dan spasial.

Teori tentang mobilitas faktor menjadi sebab para ahli ekonomi regional menjadi sangat tertarik terhadap aliran neoklasik. Hal ini sejalan dengan implikasi persaingan sempurna dimana modal dan tenaga kerja akan berpindah sesuai arus dari daerah dengan tingkat balas jasa yang tinggi ke daerah dengan balas jasa yang

lebih rendah. Selain itu tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya akan berpindah ke daerah dengan lapangan kerja yang tersedia, perpindahan tersebut nantinya akan memicu pertumbuhan ekonomi. Meskipun mengandung unsur mobilitas faktor, aliran neoklasik kurang secara jelas menyebutkan alasan riil adanya perbedaan daya saing antardaerah. Aliran neoklasik hanya menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi dalam jangka panjang akan selalu memiliki kekuatan tandingan yang akan menyeimbangkan segala ketimpangan sehingga pemerintah tidak perlu melakukan intervensi secara aktif.

3) Aliran Keynes dan Pasca-Keynes

Aliran Keynes merupakan aliran yang dipelopori oleh pemikiran John Maynard Keynes pasca-Perang Dunia I yang bersamaan dengan peristiwa besar *Great Depression* yang melanda dunia pada tahun 1930-an. Menurut Keynes, saat upah bergerak lambat sistem kapitalisme tidak akan merespon dengan cepat menuju keseimbangan penggunaan tenaga kerja secara penuh dan memerlukan peran pemerintah untuk melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal untuk menaikkan permintaan agregat.

Teori Keynes yang dikembangkan oleh Aliran Pasca-Keynes biasa dikenal sebagai teori *output* dan kesempatan kerja dalam jangka panjang. Teori tersebut berfokus pada analisis fluktuasi jangka pendek guna mengetahui perkembangan dalam jangka panjang. Menurut Aliran Pasca-Keynes, jumlah penduduk yang mengalami kenaikan akan menyebabkan pendapatan per kapita berkurang kecuali terdapat kenaikan pendapatan riil. Selanjutnya, perkembangan angkatan kerja juga

perlu dibarengi oleh jumlah output agar kondisi kesempatan kerja penuh tetap bisa dipertahankan. Selain itu, pertumbuhan investasi juga perlu dibarengi dengan pertumbuhan pendapatan untuk menghindari kapasitas menganggur (*idle capacity*).

2.4 Sektor Ekonomi Unggulan dalam Teori Basis Ekspor

Menurut Ridwan (2016), teori basis ekspor atau biasa dikenal sebagai *export base theory* merupakan bentuk model pendapatan sederhana karena membagi suatu sistem regional menjadi hanya dua bagian, yaitu daerah itu sendiri dengan daerah lain. Determinan suatu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan permintaan barang atau jasa dari daerah lain di luar batas wilayah regional. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Budiharsono (2001, dikutip dalam Hendayana, 2003) menerangkan bahwa inti dari model ekonomi basis adalah pertumbuhan ekonomi selalu berkaitan dengan ekspor wilayah. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat akan meningkat apabila terjadi pertumbuhan industri yang mempergunakan sumber daya lokal dari suatu wilayah regional.

Menurut teori basis ekspor, terdapat dua penggolongan kegiatan dalam perekonomian regional, yaitu kegiatan basis dan nonbasis. Menurut Rusastra et al (2002, dikutip dalam Hendayana, 2003) kegiatan basis atau yang sering dikenal dengan sektor unggulan adalah kegiatan ekonomi masyarakat baik berupa barang atau jasa yang difokuskan pada ekspor ke wilayah regional lain. Sedangkan kegiatan nonbasis adalah kegiatan perekonomian yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat baik itu barang atau jasa di dalam wilayah lokal.

Kegiatan basis merupakan determinan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang memiliki efek pengganda dalam perekonomian regional. Hal tersebut sejalan

dengan pendapat Richardson (1977, dikutip dalam Ridwan, 2016) yang menyatakan bahwa analisis basis ekonomi berkaitan dengan identifikasi pendapatan basis. Kegiatan basis merupakan sumber utama pendapatan bagi suatu wilayah regional, pendapatan yang berasal dari kegiatan basis akan menggerakkan perekonomian lokal yang termasuk dalam kegiatan nonbasis.

2.5 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan salah satu alat analisis dalam Ilmu Ekonomi Regional. Menurut Hood (1998, dikutip dalam Hendayana, 2003), analisis LQ mengukur derajat konsentrasi relatif dari suatu sektor atau kegiatan ekonomi dengan pendekatan perbandingan. Sejalan dengan hal tersebut, Ridwan (2016) menyatakan bahwa analisis LQ digunakan untuk mengukur besaran tingkat spesialisasi suatu sektor basis. Terdapat beberapa faktor yang dapat dipergunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam analisis LQ, misalnya PDRB dan kesempatan kerja.

Menurut Richardson (2001, dikutip dalam Purwanti, 2009) terdapat kelemahan pada teori LQ yaitu adanya ketergantungan yang sangat besar pada kekuatan pasar di luar wilayah regional, terutama secara nasional maupun global. Hal ini disebabkan karena teori LQ mendasarkan pada permintaan eksternal dan bukan internal. Selain itu teknik LQ juga mengasumsikan bahwa tingkat ekspor sangat bergantung pada tingkat disagregasi. Meskipun memiliki kelemahan, teknik analisis LQ sangat berguna untuk menentukan sektor yang perlu dikembangkan untuk mencapai stabilitas ekonomi. Selain memiliki kelemahan, teknik LQ juga

memiliki kelebihan yaitu teknik LQ memperhitungkan ekspor langsung dan tidak langsung.

Dalam penerapannya analisis LQ dibagi menjadi dua jenis, *Static Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Menurut Yuwono (2000, dikutip dalam Nazipawati, 2007) berikut adalah formula dalam perhitungan analisis SLQ:

$$SLQ_{ij} = IDS_{ij} / IDS_i \quad \dots\dots\dots (2.1)$$

$$IDS_{ij} = (X_{ij} / nY_j) \times 100 \quad \dots\dots\dots (2.2)$$

$$IDS_i = (X_i / nY) \times 100 \quad \dots\dots\dots (2.3)$$

Keterangan:

SLQ_{ij} = Tingkat Spesialisasi Sektor i di Provinsi Jawa Tengah

IDS_{ij} = Indeks Dominasi Sektor i di Provinsi Jawa Tengah

IDS_i = Indeks Dominasi Sektor i di Indonesia

X_{ij} = Nilai tambah sektor i di Provinsi Jawa Tengah

X_i = Nilai tambah sektor i di Indonesia

Y_j = PDRB Provinsi Jawa Tengah

Y = PDB Indonesia

n = Jumlah Sektor

Dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika $SLQ_{ij} < 1$, dapat diinterpretasikan bahwa sektor terkait merupakan sektor yang belum terspesialisasi dibanding sektor yang sama di tingkat nasional sehingga bisa diklasifikasikan sebagai sektor nonbasis.

- 2) Jika $SLQ_{ij} = 1$, dapat diinterpretasikan bahwa sektor terkait memiliki tingkat spesialisasi yang sama dengan sektor yang sama di tingkat nasional sehingga hanya bisa mencukupi kebutuhan di Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Jika $SLQ_{ij} > 1$, dapat diinterpretasikan bahwa sektor terkait merupakan sektor yang lebih terspesialisasi dibanding sektor yang sama di tingkat nasional sehingga bisa diklasifikasikan sebagai sektor basis.

Formula di atas merupakan cara untuk menghitung SLQ, akan tetapi perhitungan SLQ masih memiliki kelemahan yaitu masih bersifat statis dan hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu tertentu. Itu artinya sektor basis yang dihitung pada suatu tahun tertentu belum tentu merupakan sektor basis pada tahun selanjutnya. Untuk mengatasi kekurangan tersebut maka digunakan alternatif perhitungan yaitu dengan analisis DLQ.

Perhitungan DLQ menurut Yuwono (2000, dikutip dalam Nazipawati, 2007) adalah sebagai berikut:

$$DLQ_{ij} = \left[\frac{(1+g_{ij})/(1+g_j)}{(1+G_i)/(1+G)} \right]^t = \frac{IPPS_{ij}}{IPPS_i} \dots\dots\dots (2.4)$$

dimana:

$$g_{ij} = \left[\frac{(E_{ijt})}{(E_{ijo})} \right]^{1/t} - 1 \dots\dots\dots (2.5)$$

$$g_j = \left[\frac{(E_{jt})}{(E_{jo})} \right]^{1/t} - 1 \dots\dots\dots (2.6)$$

$$G_i = \left[\frac{(E_{it})}{(E_{io})} \right]^{1/t} - 1 \dots\dots\dots (2.7)$$

$$G = \left[\frac{(E_t)}{(E_0)} \right]^{1/t} - 1 \dots\dots\dots (2.8)$$

Keterangan:

DLQ_{ij} = Indeks potensi sektor i di Provinsi Jawa Tengah

g_{ij} = Rata-rata laju pertumbuhan nilai tambah sektor i di Provinsi Jawa Tengah

g_j = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah

G_i = Rata-rata laju pertumbuhan nilai tambah sektor i di Indonesia

G = Rata-rata laju pertumbuhan PDB Indonesia

t = Selisih tahun akhir dan tahun awal pengamatan (4 tahun)

$IPPS_{ij}$ = Indeks potensi perkembangan sektor i di Provinsi Jawa Tengah

$IPPS_{ij}$ = Indeks potensi perkembangan sektor i di Indonesia

E_{ijt} = Nilai tambah sektor i di Provinsi Jawa Tengah pada tahun akhir pengamatan (2020)

E_{ij0} = Nilai tambah sektor i di Provinsi Jawa Tengah pada tahun awal pengamatan (2016)

E_{jt} = PDRB Provinsi Jawa Tengah pada tahun akhir pengamatan (2020)

E_{j0} = PDRB Provinsi Jawa Tengah pada tahun awal pengamatan (2016)

E_{it} = Nilai tambah sektor i di Indonesia pada tahun akhir pengamatan (2020)

E_{i0} = Nilai tambah sektor i di Indonesia pada tahun awal pengamatan (2016)

E_t = PDB Indonesia pada tahun akhir pengamatan (2020)

E_0 = PDB Indonesia pada tahun awal pengamatan (2016)

Dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika $DLQ_{ij} > 1$, dapat diinterpretasikan bahwa sektor i di Provinsi Jawa Tengah merupakan sektor yang memiliki potensi perkembangan lebih cepat dibanding

potensi perkembangan sektor i di tingkat nasional, hal ini menandakan sektor i di Provinsi Jawa Tengah berpotensi unggulan.

- 2) Jika $DLQ_{ij} = 1$, dapat diinterpretasikan bahwa sektor i di Provinsi Jawa Tengah merupakan sektor yang memiliki potensi perkembangan sama dengan potensi perkembangan sektor i di tingkat nasional.
- 3) Jika $DLQ_{ij} < 1$, dapat diinterpretasikan bahwa sektor i di Provinsi Jawa Tengah merupakan sektor yang memiliki potensi perkembangan lebih lambat dibanding potensi perkembangan sektor i di tingkat nasional, hal ini menandakan bahwa sektor i tidak berpotensi unggulan.

Untuk interpretasi yang lebih baik diperlukan analisis komparatif terhadap SLQ dan DLQ sesuai kriteria dalam tabel II.1 berikut:

Tabel II.1 Klasifikasi Sektor Unggulan Berdasarkan Analisis SLQ dan DLQ

Kriteria	$DLQ_i < 1$	$DLQ_i > 1$
$SLQ_i < 1$	Subsektor yang belum unggul yang belum berpotensi unggulan	Subsektor yang belum unggul yang berpotensi unggulan
$SLQ_i > 1$	Subsektor unggulan yang tidak berpotensi unggulan lagi	Subsektor unggulan yang masih berpotensi unggulan

Sumber: Yuwono (2000, dikutip dalam Nazipawati, 2007)

2.6 Konsep Ketenagakerjaan dan Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai seseorang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa baik itu untuk pemenuhan kebutuhan pribadi maupun untuk masyarakat. Menurut Dumairy (1996, dikutip dalam Bella, 2018) tiap negara memiliki perbedaan dalam penentuan usia kerja,

Bank Dunia sendiri menetapkan usia kerja berada di antara 15 sampai 64 tahun. Selanjutnya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk yang dianggap memasuki usia kerja di Indonesia minimal adalah berusia 15 tahun.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan tenaga kerja menjadi dua jenis, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk yang berada di usia kerja yaitu minimal 15 tahun yang bekerja, atau memiliki pekerjaan namun tidak bekerja untuk sementara karena suatu alasan dan pengangguran. Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia minimal 15 tahun atau berada di usia kerja yang masih menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lain selain melakukan kegiatan pribadi.

Kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang tersedia sebagai akibat adanya kegiatan ekonomi. Sejalan dengan pengertian tersebut, Yasrizal dan Hasan (2016) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara angkatan kerja dengan penyerapan tenaga kerja yang disebut dengan kesempatan kerja. Itu artinya kesempatan kerja merupakan sebuah peluang dimana tersedia lapangan pekerjaan tersedia sehingga tiap orang yang bersedia dan mampu bekerja dalam kegiatan ekonomi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya masing-masing. Selanjutnya menurut Sagir (1995, dikutip dalam Yasrizal dan Hasan, 2016) membagi kesempatan kerja menjadi dua bagian, yaitu kesempatan kerja permanen dan kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja permanen adalah kondisi ketika suatu kesempatan kerja menawarkan calon pekerjanya untuk bekerja secara terus menerus hingga masa pensiun atau ketika pekerja tersebut tidak lagi mampu bekerja. Kesempatan kerja temporer adalah kondisi ketika kesempatan

kerja yang menawarkan pekerjaanya untuk bekerja, tetapi hanya dalam waktu yang relatif singkat.

Penyerapan tenaga kerja menurut Todaro (2003, dikutip dalam Sayuti dan Safitri, 2020) adalah kondisi dimana para pelaku tenaga kerja dapat diterima untuk melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Menurut Handoko (1985, dikutip dalam Ridha, 2011) terdapat dua faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dapat dipengaruhi dalam dunia usaha, sedangkan faktor eksternal merupakan sebaliknya yaitu faktor yang tidak dapat dipengaruhi dalam dunia usaha. Faktor internal terdiri atas beberapa jenis antara lain adalah tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal, dan pengeluaran selain upah. Sedangkan, faktor eksternal terdiri atas beberapa jenis yang di antaranya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran, dan tingkat suku bunga.

2.7 Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja

Dumairy (2004, dikutip dalam Trianto, 2017) mendefinisikan elastisitas sebagai penerapan teori diferensiasi dalam matematika ke dalam ilmu ekonomi. Menurut Arif dan Amalia (2010, dikutip dalam Efendi, 2014), elastisitas digunakan sebagai alat untuk mengukur kepekaan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sejalan dengan kedua pendapat tersebut, Rahmadianty (2019) mengartikan elastisitas tenaga kerja sebagai perubahan persentase permintaan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan satu persen tingkat upah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya elastisitas, di antaranya sebagai berikut.

1. Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan.
2. Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya yang digunakan untuk produksi.
3. Terdapat kemungkinan adanya substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi lain seperti modal.

Selain ketiga faktor tersebut elastisitas penyerapan tenaga kerja juga bergantung pada elastisitas penyediaan dari bahan pelengkap dalam suatu proses produksi. Contoh sederhananya adalah penggunaan mesin yang memerlukan tenaga kerja berupa operator dan bahan produksi yang dikelola manusia lain. Kapasitas mesin yang digunakan akan mempengaruhi besaran tenaga kerja yang diperlukan.

Menurut Glassburner (1976, dikutip dalam Hardiono et al, 2017) untuk menghitung elastisitas penyerapan tenaga kerja diperlukan formula sebagai berikut:

$$N = L / Q \dots\dots\dots (2.9)$$

Keterangan:

N = Elastisitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah

L = Laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor basis Provinsi Jawa Tengah

Q = Laju pertumbuhan ekonomi sektor basis Provinsi Jawa Tengah

Boediono (1991, dikutip dalam Hardiono, 2017) menyatakan kriteria dalam elastisitas penyerapan tenaga kerja sebagai berikut:

- 1) Jika $E = 1$, dapat diklasifikasikan sebagai elastis uniter yaitu kemampuan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja yang apabila terjadi kenaikan atau penurunan PDRB sebesar 1% maka jumlah tenaga yang terserap akan naik atau turun sebesar 1%.

- 2) Jika $E > 1$, dapat diklasifikasikan sebagai elastis yaitu kemampuan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja yang apabila terjadi kenaikan atau penurunan PDRB sebesar 1% maka jumlah tenaga yang terserap akan naik atau turun lebih dari 1%.
- 3) Jika $E < 1$, dapat diklasifikasikan sebagai inelastis yaitu kemampuan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja yang apabila terjadi kenaikan atau penurunan PDRB sebesar 1% maka jumlah tenaga yang terserap akan naik atau turun kurang dari 1%.

2.8 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian dengan kemiripan topik analisis sektor unggulan dan daya serap tenaga kerja pada suatu wilayah yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh beberapa peneliti, di antaranya adalah sebagai berikut:

Trianto (2017) menganalisis elastisitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2011-2015 serta menganalisis dan membandingkan elastisitas penyerapan tenaga kerja pada tingkat kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah elastisitas penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa elastisitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2011-2015 sebagian besar memiliki kategori inelastis yang artinya sektor ekonomi di Provinsi Selatan pada periode tersebut kurang menyerap tenaga kerja.

Hardiono et al (2017) melakukan penelitian untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja pada sektor basis di Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2014. Adapun

metode analisis yang digunakan adalah analisis *Location Quotient* (LQ) dan analisis elastisitas penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat empat sektor basis di Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan. Namun, hanya terdapat satu sektor basis yang bersifat elastis yaitu sektor pertanian. Ketiga sektor basis lainnya bersifat inelastis, yang diantaranya adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor keuangan, dan sektor persewaan dan perusahaan jasa.

Purwanti (2009) melakukan penelitian serupa untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor ekonomi unggulan dan menganalisis elastisitas serta koefisien tenaga kerja pada sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Muara Enim. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah analisis *Location Quotient* (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), *overlay*, elastisitas tenaga kerja, dan koefisien tenaga kerja. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi positif di Kabupaten Muara Enim pada periode 2005-2008 yang menggambarkan adanya percepatan dalam pembangunan. Sektor pertanian dan pertambangan merupakan sektor yang dominan dalam pembentukan PDRB. Selanjutnya berdasarkan ketenagakerjaan, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian.

Sayuti dan Safitri (2020) melakukan penelitian untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja sektor unggulan di Kabupaten Lombok Tengah. Adapun metode analisis yang dipergunakan adalah analisis *Location Quotient* (LQ). Berdasarkan penelitian yang telah tersebut diketahui terdapat sepuluh sektor unggulan di Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya berdasarkan analisis penyerapan tenaga

dapat diketahui bahwa sektor pertanian dan sektor industri lebih signifikan dalam penyerapan tenaga kerja dibanding sektor unggulan lain.

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui daya serap sektor ekonomi unggulan Provinsi Jawa Tengah ketika periode Pandemi COVID-19 serta tren sektor ekonomi unggulan Provinsi Jawa Tengah pada periode 2016-2020. Metode analisis yang digunakan adalah analisis LQ, analisis elastisitas penyerapan tenaga kerja, dan juga analisis deskriptif untuk menjelaskan tren sektor ekonomi unggulan pada periode 2016-2020 di Provinsi Jawa Tengah.